



Lagi, Sekwan Kota Diperiksa Kejari

Beda Keterangan dengan Bendahara dalam Kasus Perdin

DENPASAR - Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Denpasar I Gusti Rai Suta kembali diperiksa Kejari Denpasar kemarin. Ini adalah pemeriksaan kedua untuk Rai Suta setelah diperiksa pekan lalu.

"Dimintai keterangan lagi un-

tuk mengetahui proses agenda kegiatan di dewan," tandas salah satu penyelidik kepada koran ini kemarin.

Menurut dia, dari keterangan Rai Suta, setiap kegiatan perjalanan dinas (Perdin) anggota DPRD Denpasar dibahas lebih dulu di rapat pimpinan dewan sebulan sekali, yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dewan, ketua komisi-komisi, Pansus, Banggar, Baleg, BK, juga dihadiri sekwan serta kabag-kabag di Setwan Kota Denpasar.

"Dalam tahun 2013 itu, ada 63 perjalanan dinas keluar daerah dan keluar negeri. Tadi sekwan juga bawa data," terang dia. Diakui, kasus ini berawal dari hasil audit BPK RI yang menemukan adanya selisih antara manifest penerbangan dengan harga tiket. Selisihnya mencapai Rp 266 juta, dari anggaran perjalanan dinas belasan miliar dalam setahun.

"Salah satu modulusnya selisih manifest penerbangan dan harga tiket. Tapi, masih perlu

kami diskusikan lagi, termasuk dengan BPKP untuk konsultasi," terang dua.

Kasiintel Kejari Denpasar Syahrir Sagir dikonfirmasi kemarin membenarkan pemanggilan kedua Rai Suta. Kata dia, keterangan tambahan dari Rai Suta diperlukan sebab dalam pemanggilan pertama masih kurang.

"Waktu itu (pemanggilan pertama) break karena sekwan kelelahan juga. Maka dilanjutkan hari ini," terang Syahrir.

Syahrir mengatakan, dengan kedatangan kemarin, maka keterangan setwan dianggap cukup. Walau demikian, penyelidikan ini terus berjalan sebab, keterangan sekwan ada yang belum sinkron dengan pejabat di bawahnya.

"Maka kami akan memanggil bendahara setwan Nyoman Astina lagi Jumat nanti (19/6). Karena keterangan sekwan dengan bendahara masih ada yang beda, maka perlu disinkronkan," jelasnya. (yor/han)

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 24



Radar Bali

LPJ Gabeng, Dewan Adili Dishub Badung

MANGUPURA - Komisi II DPRD Badung akhirnya turutan menindaklanjuti banyaknya mati lampu penerangan jalan (LPJ) yang mati. Dewan mengadili Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung Wayan Weda Dharmaja. Komisi II meminta penjelasan banyak LPJ mati dalam kurun waktu lama, setahun lebih. Tidak hanya LPJ solar cell di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta - Nusa Dua, tapi juga LPJ yang ada masuk di perkampungan serta objek wisata.

"Kami minta agar permasalahan LPJ ini bisa teratasi. Masak Badung yang kaya ini mengurus lampu saja tidak bisa," ucap anggota Komisi II Made Wijaya kemarin (16/6). Politisi yang akrab dipanggil Yonda ini meminta lampu yang rusak diadakan peremajaan. Khususnya lampu yang berada menuju objek wisata di Badung Selatan. Menurut Wijaya, banyaknya lampu rusak membuat masyarakat bertanya-tanya. "Terus terang, kami yang di masyarakat ini yang terus dihujani pertanyaan. Jadi, kami minta agar masalah lampu ini diselesaikan," tegas bendesa adat

Tanjung Benoa ini.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Badung I Wayan Weda Dharmaja tidak membantah jika banyak lampu yang rusak. Weda mengaku LPJ di daerah Badung Selatan lebih cepat padam dari Badung utara. Hal itu karena naik turunnya daya listrik di daerah tersebut. "Yang jelas umur LPJ di Badung Selatan memang lebih pendek. Tiangnya dimakan korosi," paparnya.

Dijelaskan Weda, LPJ di Badung jumlahnya lebih dari 13 ribu, persisnya 13.131 titik yang tersebar di 6 kecamatan di Badung. Tapi sebagian besar LPJ uzur karena dipasang sebelum tahun 2000. Menurut Weda, LPJ yang dipasang mestinya berdasarkan standar yang disyaratkan PLN dan Peraturan ESDM, yakni umur sampai 15 tahun. Namun karena umur yang lawas, sehingga banyak LPJ padam. "Ada yang sejak pertama kali dipasang sebelum tahun 2000 sampai sekarang belum pernah ada peremajaan, malah masih menggunakan lampu lama. Tak heran bila kadang lampunya sering mati," jelas Weda. (san/han)

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 24